

Eksistensi Realisme dalam Aneksasi Israel Terhadap Palestina*

Ida Susilowati,¹ Muhammad Fauzi,² Sepana Virqiyani,³

'Azzam El Zahidin⁴

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

 [10.15408/jlr.v4i5.28514](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28514)

Abstract

The Palestinian people have fought for decades for their independence. However, the Palestinian area is being steadily reduced as a result of Israel's annexation efforts, therefore independence is not achieved. Political liberalism in the age of globalization is mostly ineffective, as international norms and regulations are unable to prevent Israel's annexation of Palestine. This study intends to investigate if international political realism still exists in the period of globalization, which is characterized by global political interdependence. In this work, a descriptive analytic approach with qualitative research and literature review approaches are utilized to collect data. The results demonstrate that the existence of realism may be demonstrated in the question of Israel's annexation of Palestine, where the use of force is still emphasized in order to further Israel's national interests. Israel continues to develop weapons technology in order to maintain control over Palestine as part of its annexation of the territory. In addition, Israel's alliance with Western nations, particularly the United States, and its noncompliance with international norms and laws demonstrate that political liberalism in the form of international organizations cannot be a solution to the Israeli occupation conflict in Palestine and a manifestation of realism in the age of globalization.

Keywords: Annexation; Realism; Israel; Palestine

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

¹ **Ida Susilowati** adalah dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

² **Muhammad Fauzi** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: muh.fauzi28@mhs.unida.gontor.ac.id

³ **Sepana Virqiyani** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: sepanavirqiyani94@mhs.unida.gontor.ac.id

⁴ **'Azzam El Zahidin** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: azzamelzahidin01@mhs.unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Konflik Israel dan Palestina masih menjadi fokus utama politik di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Israel terus melakukan aneksasi wilayah atas Palestina, khususnya sejak terjadinya Perang Enam Hari tahun 1967. Pasca Perang Enam Hari, Israel terus memperluas wilayahnya mulai Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Tidak berhenti pada aneksasi wilayah Israel, di tahun 2020 Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negara menggantikan Tel Aviv. Langkah Israel ini pada hakikatnya ditentang oleh masyarakat Internasional, namun Israel terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam menguasai seluruh wilayah Palestina. Kasus tersebut menggambarkan paradigma realisme dalam politik internasional, ditunjang dengan ideologi Zionisme yang dipegang oleh bangsa Yahudi. Realisme menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup Negara, dimana tidak ada kata perdamaian di dunia internasional yang anarki dalam perspektif realisme. Yang memiliki kekuasaan kuat, dialah yang akan berkuasa dan muncul sebagai pemenang.

Era globalisasi tidak terlepas dari liberalisme politik, kerjasama dan perjanjian internasional menjadi suatu keniscayaan dalam politik internasional. Peraturan dibangun untuk mencapai kepentingan nasional antar negara, namun hal tersebut tidak berlaku bagi negara Israel dalam mengokupasi Palestina. Hal tersebut menunjukkan, bahwasanya realisme politik masih eksis di tengah-tengah massifnya liberalisme politik. *Relative gain*, merupakan salah satu konsep realisme, dimana setiap pihak merasa bahwa lawan selalu lebih untung daripadanya.⁵⁶ Sehingga, tidak ada kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua negara dalam perspektif realisme. Israel seringkali melanggar berbagai perjanjian damai yang disusun dengan Palestina dan senantiasa berusaha menjadi pihak yang paling diuntungkan. Contohnya, dalam perjanjian Oslo yang dilakukan di Norwegia, 13 September 1993. Perjanjian ini mengalami kebuntuan sejak PM Israel, Benjamin Netanyahu menjabat. Banyaknya pelanggaran dari kubu Israel, membuat perjanjian ini kandas pada Rabu 30 September 2015.

Aneksasi Israel atas wilayah Palestina merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran terhadap *the right of self-determination* dari rakyat Palestina. Penindasan terhadap rakyat Palestina terus dilakukan oleh

5 Rousseau, D. L. (2002). Motivations for Choice: The Salience of Relative Gains in International Politics. *The Journal of Conflict Resolution*, 46(3), 394-426. <http://www.jstor.org/stable/3176232>

Israel, walaupun banyak negara-negara dan organisasi internasional mengancam perbuatan Israel. Kecaman tersebut tidak membuat Israel mengakhiri penjajahannya terhadap Palestina, akan tetapi Israel tetap konsisten mempertahankan kepentingan politiknya. Hal ini menunjukkan sifat Israel yang *state-centric* dan menganggap dirinya sebagai *main actor* dalam tatanan internasional. Israel menolak kebijakan organisasi internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan politiknya, hal itu dibuktikan dengan perlakuan Israel yang melanggar peraturan ICJ dengan tetap melakukan *De Facto Annexation* dengan menggabungkan wilayah pendudukan secara permanen melalui pembuatan tembok di wilayah Palestina.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi realisme di era globalisasi dalam penjajahan Israel terhadap Palestina. Bagaimana Israel terus memperluas wilayahnya di Palestina dengan mengabaikan berbagai hukum dan norma internasional. Serta bagaimana upaya Israel yang terus berusaha mencapai kepentingan nasionalnya untuk menguasai wilayah Palestina, baik melalui jalur aliansi dengan negara besar, okupasi melalui serangan bersenjata, bahkan pelanggaran terhadap berbagai perjanjian damai meski beberapa kali mendapat peringatan serta kecaman dari masyarakat Internasional yang menunjukkan wujud dari eksistensi realisme politik internasional di era globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif dipilih dalam penulisan artikel ini, melalui kajian pustaka tentang permasalahan yang berkaitan dengan tindakan okupasi Israel terhadap Palestina. Perspektif Realisme dalam memandang politik internasional dijadikan dasar analisa dalam menjawab wujud eksistensi realisme politik dalam konflik Israel – Palestina yang tak kunjung berakhir. Studi pustaka dijadikan sebagai tehnik dalam mengumpulkan data-data terkait objek penelitian, baik melalui buku-buku, jurnal, report dan sejenisnya. Tehnik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data sesuai obyek penelitian, penyajian data dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian ini mengarahkan penulis untuk mengidentifikasi bahwa realisme sebagai suatu perspektif dalam melihat tindakan suatu negara, dinilai masih relevan di era globalisasi dengan melihat tindakan Israel dalam upayanya menguasai wilayah Palestina.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sudut Pandang Realisme Dalam Memandang Politik Internasional

Perspektif realisme dalam melihat hubungan internasional selalu memandang pada realita, yaitu tentang apa yang ada dan bukan tentang apa yang seharusnya terjadi. Kaum realis beranggapan bahwa sesungguhnya konflik sudah ada di ambang pintu setiap orang, karena sifat kekerasan yang ada di dalam diri manusia yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam menjalankan negara yang berdaulat dan independen, maka negara cenderung tidak menaati otoritas di luar maupun di atas negaranya. Sifat alami manusia yang cenderung ingin mendominasi dijadikan sebagai alasan dasar atas terjadinya konflik.⁷

Menurut realis, prinsip moral tidak dapat diterapkan dalam memahami politik negara. Sebagaimana yang dinyatakan Morgenthau, bahwa tidak perlu pembenaran moral dalam realisme politik, namun cukup membedakan secara lugas antara apa yang diinginkan dan apa yang mungkin didapat di setiap saat.⁸ Artinya, realis hanya melihat kepentingan suatu negara dalam politik internasional dan me-nomor dua-kan sisi moral. Berbeda dengan realisme politik lainnya, realisme radikal memiliki tujuan yang lebih eksplisit tentang *anti-status quo*. Secara khusus, realis radikal menolak legitimasi institusi politik liberal dan lebih sering mempertahankan beberapa pemikiran Marxisme atau anarkisme. Konsep yang digagas Raymond Geuss sebagai figur utamanya, menggunakan kritik ideology (*ideology critique*) untuk menganalisis kekuasaan. Kaum realis radikal juga berpikir bahwa institusi politik liberal tidak hanya kurang sempurna, namun juga cacat secara fundamental. Oleh sebab itu, tidak sedikit para ahli politik menilai pemikiran realis radikal sebagai pemikiran pesimistis.⁹ Hal tersebut karena realis radikal hanya berfikir bahwa kerjasama dan nilai liberalis hanya sebuah ide yang sulit untuk diwujudkan, hal tersebut disebabkan karena adanya kepentingan negara yang melahirkan unsur anarkis.

2. Kepentingan Israel Dalam Ideologi Zionisme

Konflik Israel-Palestina terjadi sejak tahun 1948, yaitu sejak berdirinya negara Israel di sepertiga wilayah Palestina. Meski demikian, konflik yang

7 Sørensen, G., Møller, J., & Jackson, R. (2021). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford university press.

8 Morgenthau, H. J., Thompson, K. W., & Clinton, W. D. (1985). *Politics among nations: The struggle for power and peace*.

9 Cross, B. (2021). How radical is radical realism? *European Journal of Philosophy*.

sesungguhnya antara Israel dan Palestina telah dimulai jauh sebelum negara Israel berdiri di tanah Palestina. Berbagai hal mendasari konflik tersebut, baik dari sisi agama, histori, sosial politik dan ekonomi. Kompleksitas permasalahan bukan hanya terletak dari kedua negara, namun juga terkait negara-negara di Timur Tengah sekaligus intervensi negara-negara Barat.

Sumber semangat nasionalisme bangsa Yahudi dalam mendirikan negara Israel adalah ideologi zionisme. Zionisme berakar dari kesadaran orang-orang Yahudi akan penindasan terhadap mereka dari segi hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama yang ditindas dan terpaksa hidup diaspora di beberapa wilayah. Bagi mereka, ideologi zionisme ini merupakan wujud kesadaran bangsa Yahudi untuk mengakhiri penderitaan yang selama ini mereka alami dan agar kembali ke negeri nenek moyang bangsa Yahudi di tanah Palestina.¹⁰

Dari apa yang mereka alami tersebut menjadikannya sebuah akar historis bagi perkembangan zionisme, baik dari segi ideologis maupun politis. Tidak hanya itu, kaum Yahudi sebelumnya telah melakukan beberapa gerakan yang juga menjadi sumber semangat zionisme, seperti gerakan *Makkabiy* (586-538 SM) yang bertujuan untuk kembali kepada zion dan membangun Haikal Sulaiman. Gerakan *Bar Kokhba* (118-138 M) yang merupakan seruan kepada orang-orang Yahudi untuk berkumpul di Palestina dan mendirikan negara Yahudi, dan gerakan *Moses Krett* yang menyerupai gerakan *Bar Kokhba*. Orang Yahudi juga mendesak untuk kembali mendirikan kerajaan Israel di Palestina pada gerakan *David Robin* (1501-1532 M). Selain gerakan-gerakan tersebut, masih terdapat gerakan lainnya selama bangsa Yahudi berdiaspora di berbagai belahan dunia. Maka, ideologi zionisme dapat dipandang sebagai puncak semangat dan mimpi dari gerakan-gerakan sebelumnya.¹¹

Seiring berjalannya waktu, makna zionisme historis-ideologis beralih menjadi makna politis, sekaligus juga dimaknai dengan arti “pulang” bagi bangsa Yahudi yang berdiaspora.¹² Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada pembangunan negeri Israel, akibat dampak dari nasionalisme yang tumbuh bersama dengan semangat zionisme. Makna pembangunan di sini termasuk upaya aneksasi mereka terhadap wilayah kedaulatan Palestina. Menurut Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) pada tahun 2021 Israel telah

10 Foreign Policy Research Institute, “Origins and Evolution of Zionism”, 2015, diakses dari <https://www.fpri.org/article/2015/01/origins-and-evolution-of-zionism/>, pada 15 Juni 2022 (21.20)

11 Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*, 16(2), 172-184.

12 Z.A. Maulani, *Zionisme: Gerakan menaklukkan Dunia*, hlm. 7

mengambil kontrol daerah West Bank, Palestina seluas 27.000 meter persegi, atau seluas 85% dalam sejarah Palestina.¹³ Semangat mereka dalam merebut 'tanah yang dijanjikan' tentunya juga memakan harga yang mahal. Setidaknya sebanyak 251 warga Israel (48% dari mereka adalah pasukan militer) mati di antara tahun 2008 sampai 2021. Tentunya jumlah tersebut tidak sebanyak warga Palestina yang kehilangan nyawa, yaitu 5.739 warga di periode yang sama.¹⁴

Faktor-faktor alasan agama merupakan pendorong bagi sebagian warga Israel dalam membangun dan memperluas wilayah negara mereka. Dikatakan 'sebagian' karena hanya terdapat sekitar 10% masyarakat nasionalis-religius dari populasi Israel. Saat Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri Israel, beberapa penasihat dan orang-orang pilihannya dalam pemerintahan adalah seorang zionis-religius walaupun Netanyahu sendiri seorang sekular. Sebagian mereka juga merupakan aparat militer, dan orang-orang penting lainnya. Bagi mereka, gerakan zionis (zionist movement) bukan hanya diartikan sebagai gerakan untuk kembali 'pulang'. Namun, juga sebagai bentuk gerakan keagamaan dan pengabdian kepada Tuhan.¹⁵

3. Aneksasi Israel Terhadap Wilayah Palestina Sebagai Wujud Penjajahan Di Era Globalisasi

Sejak perang enam hari yang berlangsung di kawasan Timur Tengah, aneksasi Israel ke wilayah Palestina terus diperluas. Israel yang awalnya mendapatkan sepertiga wilayah Palestina untuk mendirikan negara, saat ini berbanding terbalik menjadi hampir $\frac{3}{4}$ wilayah Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Israel terus membangun tempat tinggal baru bagi kaum Yahudi dan mengusir warga Palestina dari tempat tinggal mereka. Gerakan zionis Israel melakukan berbagai macam cara untuk menganeksasi seluruh wilayah Palestina.¹⁶ Baik melalui diskriminasi hingga indikasi pembersihan etnis dengan mengerahkan kekuatan militer yang dibantu oleh Amerika Serikat. Selain itu, di

13 Anadolu Agency, "Israel seizes 85% of land in West Bank: Palestine", 2021, diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-seizes-85-of-land-in-west-bank-palestine/2192965>, pada 15 Juni 2022 (21.26)

14 Aljazeera, "Mapping Israeli Occupation", 2021, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/18/mapping-israeli-occupation-gaza-palestine>, pada 15 Juni 2022 (21.23)

15 Reuters, "Israel military struggles with rising influence of Religious-Zionists", 2016, diakses dari <https://www.reuters.com/investigates/special-report/israel-military-religion/>, pada 15 Juni 2022 (21.28)

16 David, Steven R (2003) "Israel's Policy of targeted killing" Ethics and International Affairs, vol.17 no. 1, 3.

bidang sosial ekonomi, Israel sengaja menutup kesempatan kerja bagi penduduk Palestina, dengan harapan mereka bermigrasi meninggalkan tanah kelahirannya.

Israel membatasi gerak warga Palestina melalui perlakuan birokratis militer Israel, yaitu dengan membangun tembok pemisah untuk mensukseskan upaya aneksasinya. Sejak tahun 1991, mulai diberlakukan surat izin bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Palestina. Pada bulan Maret 1993, keseluruhan wilayah Yerusalem Timur dimasukkan secara paksa oleh Israel sebagai wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh warga Palestina. Israel juga memberlakukan penutupan total seluruh wilayah yang dianeksasi oleh Israel. Operasionalisasi ini dilakukan dengan membangun berbagai pos penjagaan militer di seluruh *Green Line* wilayah Israel.¹⁷ Akibat dari penerapan kebijakan ini, banyak warga Palestina yang pendapatannya turun secara drastis dan berdampak pada peningkatan krisis ekonomi rakyat Palestina.

Setelah berhasil dalam pemberlakuan penutupan total terhadap hampir seluruh wilayah Palestina, Israel mulai membangun permukiman Yahudi secara besar-besaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendatangkan sebanyak mungkin populasi Yahudi di wilayah aneksasi, sehingga terjadi perubahan perimbangan demografis di seluruh wilayah aneksasi. Secara territorial, penerapan pembuatan permukiman para Yahudi adalah untuk memfragmentasikan dan mengisolasi wilayah Palestina satu dengan lainnya, sehingga rencana Israel dalam menganeksasi wilayah Palestina dapat berjalan lancar. Israel juga membangun tembok pemisah untuk membatasi mobilitas pergerakan warga Palestina. Pada bagian tembok itu, dibangun sebuah menara penembak jitu untuk tentara Israel. Hal ini bertujuan untuk membunuh warga Palestina yang mencoba untuk melarikan diri.¹⁸

Aneksasi Israel terhadap Palestina mengakibatkan kerugian bagi Palestina, antara lain¹⁹: (a) Terkikisnya wilayah Palestina dan hanya menyisakan wilayah Gaza dan tepi Barat, (b) Krisis berkepanjangan di seluruh wilayah Palestina, baik korban jiwa akibat penindasan maupun korban infrastruktur dan fasilitas umum akibat serangan-serangan Israel, dan (c) Stigma bahwa Palestina merupakan penjara terbuka terbesar di dunia, akibat pembangunan tembok tinggi di seluruh wilayah Gaza dan Tepi Barat yang dilengkapi menara dan CCTV untuk membatasi pergerakan rakyat Palestina.

17 Hass, A. (2002). Israel's closure policy: An ineffective strategy of containment and repression. *Journal of Palestine Studies*, 31(3), 5-20.

18 Surwandono, D. R. SEMINAR HUBUNGAN INTERNASIONAL.

19 Bulmer, E. R. (2003). The impact of Israeli border policy on the Palestinian labor market. *Economic Development and Cultural Change*, 51(3), 657-676.

Berdasarkan tindakan Israel atas Palestina tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Israel menguasai Palestina sesuai dengan konsep Realisme melalui penjajahan dengan alasan keamanan nasional. Dalam perspektif realisme, bahwa selama negara (Israel) masih memiliki *power* untuk menguasai negara lainnya (Palestina), maka hal tersebut bukan menjadi masalah. Karena dalam perspektif Realisme, tidak ada kata perdamaian di dunia internasional yang anarki. Siapa yang kuat dialah yang muncul sebagai pemenang.

4. Arm Race Israel Dalam Pengembangan Teknologi Senjata

Fenomena terciptanya perkembangan teknologi dan penemuan senjata-senjata baru telah menciptakan perasaan baru terkait dengan seberapa pentingnya peningkatan kemampuan pertahanan suatu negara dapat terus berjalan. Pesatnya era modernisasi kekuatan militer terkait erat dengan keamanan nasional suatu negara. Suatu negara dapat merasa aman jika negara tersebut mampu menjamin sendiri perlindungan dirinya. Maka dari itu sebagian besar negara merasa perlu untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya kekuatan militernya dengan sumber dayanya untuk menciptakan keamanan negaranya.²⁰ Termasuk Israel saat ini yang dimana kondisi negaranya sangat rentan dalam bidang pertahanan sehingga mendorong Israel untuk meningkatkan doktrin keunggulan militernya melampaui seluruh negara-negara Arab sekitar yang bermusuhan dengan Israel. Maka dari itu Israel sangat dikenal sebagai negara yang bersinergi mengkombinasikan berbagai model pembangunan militer yang paling kuat di dunia. Israel meliki teknik yang sangat cerdas yaitu mereka mengadopsi perang darat model Jerman, perang udara model Amerika Serikat, mobilisasi massa model Prancis dan Jerman.²¹

Melihat fenomena tersebut membuktikan bahwasanya Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara yang paling banyak memberikan bantuan persenjataan kepada Israel. Amerika Serikat merupakan negara eksportir terbesar ke Israel. Hal itu dibuktikan berdasarkan catatan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), Amerika Serikat rutin menjual senjata setiap

20 Anggun Puspitasari (2013) "Telaah Konseptual Dinamika Persenjataan: Perlombaan Senjata (Arm Race) dan Pembangunan Kapabilitas Persenjataan Militer (Arms Military Build-UP) dalam Pola Aksi-Reaksi" *Jurnal Hubungan Internasional universitas Budi Luhur Jurnal*, Vol.8 No.2 Desember 2013

21 Hirsh Goodman (2001) "Israel's Strategic Reality: The Impact Of The Arms Race" *The Washington Institute For Near Eastpoucy* 500 North Capitol Street, N.W. Suite 31, Washington, D.C. 2001.

tahun kepada Israel sejak 1961.²² Bahkan pada tahun 1975 Amerika Serikat memberikan bantuan berupa rudal dengan daya ledak 130-145 KM. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan senjata berupa bom yang sering digunakan angkatan udara Israel untuk menggempur jalur Gaza. Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa anggaran militer kepada Israel yang nilainya sampai 54,3 Triliun dengan tujuan Israel mampu untuk meningkatkan sistem rudal pertahanan serangan udara berupa *Iron Dome* dan Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa pesawat jet tempur dengan tujuan untuk memperkuat angkatan udara Israel.²³

Selain Amerika Serikat, Jerman merupakan negara eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel. Beberapa senjata yang dibeli Israel dari Jerman yaitu kapal selam kelas Dolphin, dengan tujuan untuk memperkuat angkatan laut Israel. Selain kapal selam senjata tempur lainnya yang dibeli dari Jerman adalah *Tank Merkava* yang merupakan senjata andalan Israel dalam bertempur di daerah daratan. Tank tersebut terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh Israel dikarenakan sangat berguna bagi eksistensi keamanan Israel khususnya di daerah daratan.²⁴ Untuk memperkuat wilayah kekuasaannya Israel sedang memperkuat proyek senjata nuklirnya yang juga dibantu oleh negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Melihat fenomena tersebut, bantuan-bantuan teknologi senjata dari berbagai negara sekutu diharapkan mampu untuk menjaga keamanan nasional negara Israel, karena dengan cara itulah Israel mencapai keamanan nasionalnya yang menjadi sebuah prioritas absolut dari suatu negara.

5. Aliansi Israel Dengan Amerika Serikat Sebagai Wujud Eksistensi Realisme

Israel senantiasa berupaya untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya untuk mendapatkan legitimasi wilayah Palestina. Israel bahkan berusaha menghilangkan peta Palestina dalam peta dunia. Aneksasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina dengan menggunakan militer dan senjata, mengindikasikan

22 Muhammad, A. M. (2017). Peran American Military Industrial Complex dalam Konflik Bersenjata di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 1(1), hal. 45-64.

23 Ibnu Burdah (2008) "Pembangunan Nuklir Israel: Makna strategisnya di Timur Tengah" *Jurnal Al-Qolam* Vol 23. No. 3 September-Desember 2008 hal. 470-489

24 Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), hal. 135-144.

adanya metode *hard power* sebagai identitas realisme.²⁵ Hal tersebut menunjukkan eksistensi realisme yang tidak dapat digeser dengan liberalisme meski di era globalisasi. Meskipun tindakan aneksasi Israel melanggar norma dan hukum internasional, Israel tetap menunjukkan sifatnya sebagai *state-centric* yang menganggap dirinya sebagai *main actor* dalam tatanan internasional di balik dukungan Amerika Serikat.

Dalam mencapai kepentingan untuk mengambil alih wilayah Palestina, Israel diduga mendapat bantuan dari Amerika Serikat dengan alasan sebagai bentuk *Balance of Power* kawasan MENA (*Middle East and North America*). Dalam perspektif Realisme, terdapat suatu konsep *balance of power* dimana konsep ini menyatakan bahwa diperlukan perimbangan kekuatan antar dua aktor dalam dunia internasional, agar mencegah satu aktor menjadi terlalu kuat.²⁶ Israel disini bertugas sebagai penyeimbang kekuatan yang dibutuhkan oleh AS. Langkah aneksasi Israel pada hakikatnya ditentang oleh mayoritas komunitas Internasional, akan tetapi dukungan Amerika Serikat cukup membantu Israel untuk menguasai hampir seluruh wilayah Palestina bahkan menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel.²⁷

MENA adalah sebuah singkatan atau akronim bahasa Inggris yang merujuk kepada wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Atau biasa disebut dengan akronim lain yang disebut SWANA (South West Asia and North Africa; Asia Barat Daya dan Afrika Utara). Istilah akronim MENA ini seringkali dipakai dalam bidang akademik, kekuatan militer, pemulihan bencana, media penyiaran dan penulisan dalam urusan bisnis. Wilayah MENA terdiri dari; Algeria, Bahrain, Djibouti, Mesir, Iran, Irak, Israel, yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, maroko, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syiria, Tunisia, UEA, Palestina, Yaman.²⁸

Kepentingan AS di wilayah MENA cukup besar, baik dalam sisi politik, ekonomi, maupun pertahanan. Oleh sebab itu, Israel dijadikan sebagai "perwakilan" AS yang ada di Timur Tengah, sehingga AS lebih mudah untuk

25 Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

26 Nexon, D. H. (2009). The balance of power in the balance. *World Politics*, 61(2), 330-359.

27 Kaslam (2021) "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)" Review of International Relations Volume 3, Nomor 2, 2021

28 Countries. "MENA COUNTRIES". (2014). Diakses dari <https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247619~pagePK:146748~piPK:146812~theSitePK:256299,00.html>.

Pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 10:59

menjalankan propaganda-propaganda mereka di wilayah MENA.²⁹ Kepentingan tersebut berawal dari sejarah Perang Dingin 1947, dimana Amerika Serikat berusaha melakukan *counter hegemoni* di kawasan Timur Tengah terhadap Uni Soviet yang sudah terlebih dahulu memasuki kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat menilai, bahwa dengan memberi dukungan kepada Israel dapat memudahkan pengaruhnya masuk di wilayah MENA.

Selain alasan *Balance of Power* diatas, Amerika Serikat juga bermaksud menggantikan peran Inggris sebagai pelindung keamanan utama Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Teluk Persia (1960-1970-an), yang bertujuan untuk mendapatkan pasokan minyak yang stabil dari Teluk Persia.³⁰ Seperti yang kita tahu wilayah Teluk Persia adalah wilayah yang kaya akan SDA minyak bumi terbesar di dunia. Selain minyak, gas juga ditemukan di sepanjang Teluk Persia.³¹ Dari penjelasan diatas terlihat dengan jelas, bahwa selain kepentingan militer, Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan ekonomi di wilayah MENA ini.

Israel merupakan partner yang baik dalam hal pengembangan teknologi militer AS. Di sisi lain, Israel yang secara aktif menginvasi wilayah Palestina, membutuhkan pasokan alat persenjataan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, industri senjata AS akan tetap diuntungkan selama perang masih berkobar antara Israel dan Palestina. Israel membuktikan kehebatan kekuatannya militernya dalam perang 6 hari tahun 1967, dimana Israel mampu memenangkan pertempuran melawan 5 negara, yaitu; Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon ditambah kekuatan dari Palestina yaitu PLO (*Palestine Liberation Organisation*). Dalam perang tersebut, AS mengucurkan dananya hingga 450%.³²

Kerjasama AS dan Israel menciptakan simbiosis mutualisme antara keduanya. AS perlu bantuan Israel untuk menyeimbangkan pengaruhnya di wilayah Arab, sementara Israel membutuhkan dana dari AS untuk menjaga superioritas militer sekaligus dominasi politiknya atas Palestina. Namun, dalam paradigma Realisme, tidak ada namanya kerjasama mutlak yang saling menguntungkan satu sama lain berdasarkan konsep *relative gain*. Selain beraliansi dengan Amerika Serikat, Israel juga bekerjasama dengan Inggris. Hal

29 Mezran, K., & Varvelli, A. (2019). *The MENA region: A great power competition*. Ledizioni-LediPublishing., 14-22

30 Sylvan and Majeski, "An Agent-Based Model of the Acquisition of U.S. Client States."

31 Northrup, Cynthia Clark (2013). *Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present*. London, UK: Routledge, 733.

32 Tucker, Spencer C. (2010). *The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts*. ABC-CLIO, ISBN 978-1-85109-947-4. hlm. 1198.

tersebut menggambarkan konsep *Jackal Bandwagoning* dalam perspektif realisme, yaitu ketika suatu negara merapat ke negara besar untuk mendapatkan keuntungan.³³ Israel dengan menggunakan gerakan Zionisme-nya mampu bekerjasama dengan negara-negara besar seperti AS dan Inggris karena kesamaan sejarah, yaitu sama-sama berasal dari bangsa Yahudi, sehingga mereka membantu Israel mencapai tujuannya, yaitu untuk menganeksasi wilayah Palestina.

6. Pelanggaran Norma Hukum Internasional Oleh Israel Sebagai Bentuk Penolakan Liberalisme Politik Dan Eksistensi Realisme

Aneksasi Israel terhadap Palestina dinilai melanggar norma dan hukum internasional, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hal, diantaranya:(a) Pelanggaran keputusan ICJ dalam Advisory Opinion Wall³⁴, dimana ICJ menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak atas *Self Determination* Palestina dan telah melakukan *De Facto Annexation* dengan pembangunan tembok di wilayah Palestina yang menghambat dan membatasi mobilitas rakyat Palestina., (b) Pelanggaran terhadap prinsip *Self Determination* terhadap rakyat Palestina, yang ditunjukkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/67/19 (2012)³⁵, yang menyatakan bahwa Israel melanggar hukum ini dengan adanya aneksasi Israel sejak 1967 sehingga mengakibatkan penderitaan berkepanjangan atas rakyat Palestina, dan (c) Pelanggaran keputusan ICC tentang *Self Determination*, yang tertuang dalam Pre Trial Chamber I Mahkamah Pidana Internasional (ICC)³⁶ tentang pengecaman aneksasi Israel di wilayah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Aneksasi Israel atas wilayah Palestina termasuk bentuk pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran terhadap *the right of self-determination* rakyat Palestina. Penindasan Israel terhadap rakyat Palestina banyak dikemukakan masyarakat internasional dan organisasi internasional, akan tetapi Israel tidak

33 Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. *International security*, 19(1), hlm. 72-107.

34 International Court Of Justice (2004) "Legal Consequences Of The Construction Of A Wall In The Occrpied Palestinian Territory" ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf>

35 General Assembly (2012)" Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, Status of Palestine in the United Nations" General 4 December 2012

36 International Criminal Court (2021)" Situation in the state of Palestina" advisory opinion of 05 february 2021

mengindahkan struktur dan hukum internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan politiknya.

Selain pelanggaran hukum internasional, perbuatan aneksasi Israel juga melanggar norma hukum internasional dan prinsip *jus cogen* sebagai prinsip utama dalam hukum internasional. Norma-norma internasional yang dilanggar oleh Israel antara lain; (a) *Norma Self Determination*, yaitu tentang hak kepada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan., (b) *Norma Uti Possidetis Juris*, yaitu norma yang menjelaskan bahwa batas-batas wilayah yang dimerdekakan semestinya identik dengan batas wilayah kolonial. Prinsip ini diperkuat ICJ dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences* (2019). Menurut ICJ, norma *self determination* juga mewajibkan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh dipecah-pecah.³⁷ dan (c) *Norma Non-Use of Force*, yang berlaku sejak di susunnya piagam PBB 1945 dan ditekankan melalui *Declaration on Friendly Relation*.³⁸ Norma ini menjelaskan tentang pelarangan penggunaan kekerasan untuk memperoleh suatu wilayah.

Berbagai upaya damai melalui perjanjian bilateral Israel-Palestina selalu mengalami kegagalan akibat pelanggaran perjanjian oleh Israel, diantaranya; (a) *Perjanjian Armistice 1949*, perjanjian untuk mengakhiri perang Arab-Israel 1948 dengan menentukan batas wilayah negara-negara berkonflik yang dikenal sebagai *Green Line*.³⁹ Pelanggaran atas perjanjian Armistice 1949, mengakibatkan pecahnya Perang Enam Hari yang mengubah peta politik di Timur Tengah.⁴⁰ (b) *Perjanjian Camp David* tentang penghentian konflik Arab-Israel secara umum, dimana terdiri dari tiga hal yaitu; mewujudkan pemerintahan otonom di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pengakuan hak-hak rakyat Palestina, dan pemberian otonomi penuh dalam waktu lima tahun⁴¹. Namun Israel membatalkan proses dekolonisasi Palestina dalam perjanjian Camp David tersebut, dengan alasan

37 International Court of Justice (2019) "Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965" Advisory Opinion Of 25 February 2019 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf>

38 General Assembly (1962) "Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations" <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>

39 Oren, M. B. (1989). Escalation to Suez: The Egypt-Israel Border War, 1949-56. *Journal of Contemporary History*, 24(2), hlm. 347-375.

40 Jeremy Bowen, 2017, "1967 war: Six days that changed the Middle East", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39960461>, pada 15 Maret 2022 (09.22).

41 Ulum, M. (2019). Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981, 65

kurangnya kekuatan dokumen resmi pada kesepakatan tersebut⁴². Pelanggaran Israel terhadap perjanjian Camp David kembali mengundang amarah warga Palestina, sehingga gerakan Intifada kedua pun pecah.⁴³, (c) *Perjanjian Oslo* antara Israel dengan PLO pada tahun 1995, terkait perbatasan, permasalahan Jerusalem, pengungsi, pemukiman, dan keamanan.⁴⁴ Perjanjian tersebut menyerukan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat serta pembentukan otoritas pemerintahan Palestina selama 5 tahun masa transisi di Betlehem, Hebron, Jenin, Nablus, Qalqilya, Ramallah, Tulkarm, dan sekitar 450 daerah lainnya. Perjanjian ini pun dilanggar Israel setelah perdana menteri Israel Yitzhak Rabin⁴⁵ terbunuh. Israel berhenti menyerahkan wilayah dan kekuasaan kepada Palestina, serta kesepakatan-kesepakatan inti lain pada perjanjian tersebut. Dan beberapa perjanjian lainnya yang dilanggar oleh Israel.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, beberapa upaya perdamaian dibentuk di era Presiden Amerika George W. Bush yang turut menyerukan pembentukan negara Palestina. Beberapa dari upaya tersebut adalah *Bush Declaration* atau Peta Jalan Perdamaian Arab (2000-2003), KTT Annapolis (2007), Pidato PM Israel Benjamin Netanyahu (2009), Penangguhan Pendudukan Israel (2010), hingga Negosiasi Washington (2013-2014),⁴⁶ namun kembali tidak menghasilkan perdamaian antara kedua Negara. Beberapa hasil dari perjanjian seringkali merugikan Palestina, seperti terbentuknya normalisasi negara-negara Arab dengan Israel.⁴⁷ Salah satu bentuk perjanjian yang sangat merugikan Palestina adalah Proposal Damai Trump atau yang dianggapnya sebagai

42 Muhammad Fakhriyansyah, "Perjanjian Camp David dan Pergolakan Timur Tengah Tak Kunjung Reda", 2021. Diakses dari <https://tirto.id/perjanjian-camp-david-dan-pergolakan-timur-tengah-tak-kunjung-reda-gbvp>, pada 15 Maret 2022 (23.00).

43 Sudiar, S. (2002). *KETIDAKEFEKTIFAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PROSES PERDAMAIAN PALESTINA-ISRAEL (STUDI ANALISIS NEGOSIASI MADRID 1991-CAMPDAVID 2000)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), 26.

44 Nor, M. R. M., & Hamzah, S. Z. (2015). PERJANJIAN OSLO: KAJIAN TERHADAP PROSES DAMAI KONFLIK ARAB-ISRAEL (Oslo Accord: A Study on Peace Process of Arab-Israel Conflict). *Journal of Al-Tamaddun*, 10(1), hlm. 51-69.

45 Itamar Rabinovich. (2018). The Rabin Assassination as a Turning Point in Israel's History. *Israel Studies*, 23(3), 25-29. <http://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.23.3.05>

46 CNN Indonesia, "Menilik Jejak Upaya Damaikan Israel-Palestina", 2021, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210520114552-120-644669/menilik-jejak-upaya-damaikan-israel-palestina>, pada 15 Maret 2022 (23.31)

47 Aljazeera, "Arab normalisation with Israel in 500 words", 2020, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/23/the-normalisation-of-ties-between-israel-and-arab-countries>, pada 16 Maret 2022 (09.36)

“kesepakatan abad ini” terkait rencana penetapan Jerussalem sebagai ibu kota Israel⁴⁸ dan Jerussalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Keberadaan PBB belum dapat menyelesaikan konflik bersenjata Israel terhadap Palestina. Hukum dan norma internasional belum mampu memaksakan keputusannya terhadap Israel, hal ini senada dengan pandangan kaum realis radikal yang berpikir bahwa institusi politik liberal tidak hanya tidak sempurna, bahkan cacat secara fundamental. Lembaga supranasional maupun perjanjian yang terbentuk darinya, dinilai hanya menguntungkan salah satu pihak sebagai alat mencapai kepentingan nasionalnya. Kondisi ini disebut sebagai *relative gain*, yaitu kondisi psikologis negara yang merasa dicurangi oleh mitranya, sehingga sulit mencapai kesepakatan. Bargaining politik dianggap hanya akan menciptakan *zero-sum game*, meskipun realis tidak menolak kemungkinan kerjasama antarnegara.⁴⁹

D. KESIMPULAN

Konflik Israel–Palestina bukanlah sekedar konflik, namun lebih pada penjajahan dan aneksasi wilayah kedaulatan Palestina. Israel yang menganggap dirinya sebagai main actor dalam tatanan struktur internasional yang anarkis, seringkali mengabaikan hukum dan norma internasional. Keberadaan PBB juga dinilai tidak mampu menyelesaikan aneksasi Israel terhadap Palestina, sehingga menguatkan pandangan kaum realis radikal yang berpikir bahwa institusi politik liberal tidak hanya tidak sempurna tetapi juga cacat secara fundamental. Aneksasi Isreal terhadap Palestina menunjukkan eksistensi realisme di tengah-tengah struktur liberalis dalam politik internasional. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa hal, diantaranya; (1) Upaya Israel untuk menguasai Palestina ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya penguatan militer (hard power) dan peningkatan modernisasi senjata (arm race) untuk menguasai Palestina., (2) Aliansi Israel dengan beberapa negara-negara besar khususnya Amerika Serikat dan Inggris, guna mendukung upayanya dalam mengambil alih wilayah Palestina., dan (3) Pelanggaran hukum dan norma internasional tentang *self determination* sebagai wujud penolakan Israel atas kesepakatan internasional. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa aneksasi Israel terhadap wilayah

48 Jeremy Bowen, “Trump’s Middle East peace plan: ‘Deal of the century’ is huge gamble”, 2020, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815>, pada 16 Maret 2022 (09.38).

49 Rosyidin, M. (2020). Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat. Depok: Rajagrafindo, 31.

Palestina merupakan wujud eksistensi realisme di tengah arus liberalisme politik di era globalisasi.

REFERENSI

- Sørensen, G., Møller, J., & Jackson, R. (2021). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford university press.
- Morgenthau, H. J., Thompson, K. W., & Clinton, W. D. (1985). *Politics among nations: The struggle for power and peace*.
- Cross, B. (2021). How radical is radical realism? *European Journal of Philosophy*.
- Laqueur, W. (2009). *A history of Zionism: From the French Revolution to the establishment of the State of Israel*. Schocken.
- Renton, James (2007). *The Zionist Masquerade: The Birth of the Anglo-Zionist Alliance 1914–1918*. Palgrave Macmillan.
- Benvenisti, M. (1996). *City of stone: the hidden history of Jerusalem*. Univ of California Press.
- Peretz, D. (2019). *The West Bank: history, politics, society, and economy*. Routledge.
- Ali Wibisono (2005) "Kebijakan okupasi Israel dan kegagalan proses perdamaian Israel-Palestina" *Global: Jurnal Politik Internasional* Vol: 7 No: 2
- David, Steven R (2003) "Israel's Policy of targeted killing" *Ethics and International Affairs*, vol.17 no. 1
- Hass, Amira. (2002). "Israel's Closure Policy: An Ineffective Strategy of Containment and Repression" *Journal of Palestine studies* XXXI No.3, Spring 2002
- Bulmer, Elizabeth Ruppert "The Impact of Israel border policy on the Palestinian labor market." *Economic Development and cultural change*, Vol 51 ISS 3
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oren, M. B. (1989). Escalation to Suez: The Egypt-Israel Border War, 1949-56. *Journal of Contemporary History*, 24(2), 347-375.
- Ulum, M. (2019). *Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981*.
- Sudiar, S. (2002). *Ketidakefektifan Resolusi Konflik Dalam Proses Perdamaian Palestina-Lsrael (Studi Analisis Negosiasi Madrid L991-Campdavid 2000)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nor, M. R. M., & Hamzah, S. Z. (2015). Perjanjian Oslo: Kajian Terhadap Proses Damai Konflik Arab-Israel (Oslo Accord: A Study on Peace Process of Arab-Israel Conflict). *Journal of Al-Tamaddun*, 10(1), 51-69.

- Itamar Rabinovich. (2018). The Rabin Assassination as a Turning Point in Israel's History. *Israel Studies*, 23(3), 25–29. <http://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.23.3.05>
- Rosyidin, M. (2020). Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat. *Depok: Rajagrafindo*.
- Nexon, D. H. (2009). The balance of power in the balance. *World Politics*, 61(2), 330-359.
- Mezran, K., & Varvelli, A. (2019). *The MENA region: A great power competition*. Ledizioni-LediPublishing.
- Sylvan and Majeski, "An Agent-Based Model of the Acquisition of U.S. Client States."
- Northrup, Cynthia Clark (2013). *Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present*. London, UK: Routledge
- Tucker, Spencer C. (2010). *The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts*. ABC-CLIO. hlm. 1198. ISBN 978-1-85109-947-4.
- Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. *International security*, 19(1), 72-107.
- Kaslam (2021) "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)" Review of International Relations Volume 3, Nomor 2, 2021
- International Court of Justice (2004)" Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occrped Palestinian Territory" ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf>
- General Assembly (2012)" Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, Status of Palestine in the United Nations" General 4 December 2012
- International Criminal Court (2021)" Situation in the state of Palestina" advisory opinion of 05 february 2021
- International Court of Justice (2019) "Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius In 1965" Advisory Opinion of 25 February 2019 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf>
- General Assembly (1962) "Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations" <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>

- Mathes, W. M. (1973). *Gold, Glory, and the Gospel: The Adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers*. Alkitab sabda. "1 Raja-raja 11:36" Diakses dari <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=11&chapter=11&verse=36>. Pada 14 Maret 2022 pukul 22:06
- Alkitab Sabda. "Kejadian 12:6-7" Diakses dari <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%2012:6-7&tab=text>. Pada 14 Maret 2022 pukul 22:00.
- Ensiklopedia Holocaust. "Antisemitisme". Diakses dari <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/antisemitism>. Pada 14 Maret 2022 pukul 21:44
- Levin, Brian. (2011). "Stone Cold Jew-Baiting". Diakses dari https://www.huffpost.com/entry/stone-cold-jew-baiting_b_659335 pada 14 Maret 2022 pukul 21:37.
- Jeremy Bowen, 2017, "1967 war: Six days that changed the Middle East", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39960461>, pada 15 Maret 2022 (09.22).
- Muhammad Fakhriansyah, "Perjanjian Camp David dan Pergolakan Timur Tengah Tak Kunjung Reda", 2021. Diakses dari <https://tirto.id/perjanjian-camp-david-dan-pergolakan-timur-tengah-tak-kunjung-reda-gbvp>, pada 15 Maret 2022 (23.00).
- CNN Indonesia, "Menilik Jejak Upaya Damaikan Israel-Palestina", 2021, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210520114552-120-644669/menilik-jejak-upaya-damaikan-israel-palestina>, pada 15 Maret 2022 (23.31)
- Aljazeera, "Arab normalisation with Israel in 500 words", 2020, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/23/the-normalisation-of-ties-between-israel-and-arab-countries>, pada 16 Maret 2022 (09.36)
- Jeremy Bowen, "Trump's Middle East peace plan: 'Deal of the century' is huge gamble", 2020, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815>, pada 16 Maret 2022 (09.38).
- Countries. "MENA COUNTRIES". (2014). Diakses dari <https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247619~pagePK:146748~piPK:146812~theSitePK:256299,00.html>. Pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 10:59